Jurnal

Volume 1, Issue 1, Juli 2020
ISSN-P : 2515-3150

ILMU HUKUM

KANTURUNA WOLIO

Volume 1, Issue 1, Juli 2020

ISSN-P:2715-3150

Publikasi
Berkala
Gagasan
Konseptual
Kajian
Teoritis,
dan Hasil
Penelitian

ILMU HUKUM | Volume 1, Issue 1, Juli 2020

KEPENGELOLAAN KEUANGAN DI INDONESIA

Darmawan Wiridin

Abstract

The purpose of this study is to determine the government financial management in the form of the State Expenditure Budget (APBN) and Regional Expenditure Budget (APBD).

The type used in this research is normative legal research, which examines positive legal provisions, legal principles, legal principles and legal doctrines in order to answer legal issues faced by using a statute approach, conceptual approach (conceptual approach) and historical approach (historical approach).

The State Expenditure Budget is an obligation of the central government which is recognized as a reduction in net asset value. State expenditure is defined as government expenditure in the widest possible sense, in order to meet the needs of state administration depending on the type and nature of said government expenditure either for daily or routine needs or for meeting development achievements.

Keywords: Government finance, management, manager

Author's Information:

*Dosen Fakultas Hukum,
Universitas Dayanu
Ikhsanuddin, Indonesia
(adilahwan@gmail.com)*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga penyelenggara Negara (Pemerintah) setiap tahun mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama DPR.

Karena merupakan bagian dari keuangan Negara, maka dalam kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta untuk menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.

Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien baik dari sisi alokasi, teknis maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci dan mendukung fungsi-fungsi pokok. Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dengan mekanisme

dan proses bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja dapat menjaga stabilitas ekonomi makro, mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung daya saing.

Kuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban Negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran).

Sudah menjadi kewajiban bahwa anggaran harus benar-benar dikelola secara berkualitas. Kualitas belanja dapat diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya *output* dan *outcome* yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan.

Masalah utama penganggaran selama ini karena penekanan diberikan pada kontrol terhadap *input* bukan pada pencapaian *output* dan *outcomes*. Pendekatan penganggaran ini disebut pendekatan tradisional yaitu pengalokasian menggunakan konsep inkremental dan penyusunan berdasarkan pos belanja bukan berdasarkan kinerja yang akan dicapai sehingga hal tersebut menimbulkan pengalokasian sumber daya yang jumlahnya terbatas tidak efisien.¹

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara dimulai sejak dikeluarkannya paket kebijakan undang-undang keuangan negara, yang terdiri dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini telah menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan keuangan negara.

Amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar. Salah satunya adalah penerapan pendekatan penganggaran yang digunakan dalam penyusunannya berupa pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran

¹ Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 2.

Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Anggaran pemerintah mengikuti sebuah siklus yang diawali dengan perencanaan dan penganggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pencatatan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Dalam rangka reformasi keuangan negara khususnya PBK, Kementerian Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO) menerbitkan beberapa peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran lingkup K/L yang berorientasi kinerja. Sampai saat ini, penerapan PBK lingkup K/L masih dalam tahap pengenalan (*presentasional*). Pengalokasian anggaran telah menggunakan informasi kinerja namun belum menunjukkan keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dan kinerjanya.

Upaya perbaikan terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku CFO, salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Selain berperan sebagai CFO, Kementerian Keuangan selaku *Chief Operational Officer* (COO) juga terus berupaya mengimplementasikan PBK dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, Kementerian Keuangan berinisiatif menyusun *framework* penerapan PBK dalam bentuk *Better Practice Guide* (BPG). Penyusunan BPG Penganggaran Berbasis Kinerja ini merupakan salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan sebagai COO yang mengelola Bagian Anggaran (BA) 015 yang merupakan *pilot project* penerapan anggaran berbasis kinerja.

Walaupun reformasi bidang keuangan negara sudah dilakukan sejak tahun 2003, namun kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan dalam implemenasinya. Kebijakan, perencanaan, dan penganggaran sering tidak sejalan dengan pelaksanaan di tahun berjalan. Hal ini dapat dilihat dengan terlalu sering terjadinya revisi anggaran di tahun berjalan, yang dapat mengindikasikan bahwa antara, kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang dilakukan tidak dilakukan dengan baik. *The Worldbank* (1998) mengungkapkan bahwa kelemahan pada alokasi dan penggunaan sumber daya adalah termasuk: lemahnya perencanaan; tidak ada kaitan antara pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran; lemahnya pengendalian terhadap pengeluaran; rendahnya hubungan antara anggaran yang dirumuskan dengan anggaran yang dieksekusi; serta tidak cukupnya pelaporan atas kinerja keuangan.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul.

Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakikatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Karena wewenang dan fungsi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundangan, maka materi yang akan diuraikan dalam modul ini juga mencakup pembatasan-pembatasan seperti itu, misalnya persetujuan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif. Dengan demikian, pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh pemerintah diharapkan sesuai dengan koridor peraturan, selain aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas. pengelolaan APBN yang mencakup pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, karena Kementerian Keuangan mempunyai posisi strategis dalam pengelolaan keuangan negara, yakni sebagai Chief Financial Officer.²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran Negara

Pengertian anggaran negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli di bidang anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut: anggaran negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran tertinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama.³ Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut.⁴

² Mada, *Pengelolaan Keuangan Negara, Punditiat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Punditiat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta 2016*, hlm. 3-2

³ Dad, *berdasarkan, Iswatyudi, Bondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat*, hlm. 21

⁴ Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPPN, hlm. 5

- a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah).
- b. Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik.
- c. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta di mana anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasi kepada public untuk diberi masukan dan kritik.
- d. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.
- e. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran Negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan.

B. Pengertian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁵ Merujuk

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

- a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.
- b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara.⁶ Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.⁷

C. Sumber Keuangan Negara

Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara. Lain kata, pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut.

Pendapatan negara yang diperkenankan secara yuridis, tersebar dalam berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansi terhadap pendapatan negara tersebut. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara sebagai berikut;

1. Negara yang terdiri dari;
 - a. pajak penghasilan
 - b. pajak pertambahan nilai barang

⁶ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1/2004)

- c. pajak penjualan atas barang mewah, dan
- d. bea materai
- 2. Bea dan cukai terdiri dari;
 - a. bea masuk
 - b. Cukai gula dan
 - c. Cukai tembakau
- 3. penerimaan negara bukan pajak terdiri dari;
 - a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
 - e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah dan
 - g. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini didasarkan pada pengaturan tentang penerimaan negara sebagai sumber keuangan negara yang berasal dari ketentuan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijabarkan kedalam undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan penerimaan negara merupakan landasan hukum atas keberadaan dan pengelolaan keuangan negara yang wajib ditaati. Ketika terjadi perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara berarti menimbulkan konsekuensi penyalahgunaan keuangan negara yang berujung pada kerugian keuangan negara.

D. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara keseluruhan kegiatan pengelola sesuai kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pertanggung-jawaban, dan pemeriksaan keuangan negara. Jadi ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi;⁸

1. perencanaan keuangan negara
2. pelaksanaan keuangan negara
3. pengawasan keuangan negara
4. pertanggungjawaban keuangan negara

Pejabat yang ditugasi melakukan pengelolaan keuangan negara, harus memperhatikan dan asas-asas hukum yang mendasarinya. Hal ini dimaksudkan agar pejabat tersebut mampu meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian dengan tetap berpatokan pada asas-asas pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara terdiri dari

1. pengelolaan uang negara (pengelolaan negara; pelaksanaan penerimaan negara; pengelolaan uang persediaan;
2. pengelolaan piutang dan utang negara (pengelolaan piutang negara; pengelolaan utang Negara);
3. pengelolaan investasi;
4. pengelolaan barang milik Negara.

D. Pengelola keuangan negara

Anggaran negara yang memuat keuangan negara dalam waktu 1 tahun, memerlukan pengelolaan yang benar dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keuangan negara. Pengelola keuangan negara dalam hukum keuangan negara memiliki berbagai sebutan atau kenamaan yang berbeda-beda. Perbedaan penyebutan atau kenamaan bagi pengelola keuangan negara didasarkan pada kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. Walaupun terdapat perbedaan penyebutan atau penamaan, tanggung jawab bagi pengelola keuangan negara tidak berbeda, ya itu tidak boleh menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini Paling pokok adalah mengelola keuangan negara dengan tujuan untuk kepentingan negara dalam

⁸ Ibid, hlm. 17

d. Dana Otonomi khusus seperti untuk Aceh dan Papua

Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.

B. Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara

Tidak seperti halnya penyusunan prakiraan belanja negara, di mana dilakukan pembahasan antara Kementerian Keuangan, Bappenas selaku Kementerian Perencanaan dan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, maka penentuan perkiraan pendapatan negara pada dasarnya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dibantu Bappenas dengan memperhatikan masukan-masukan dari Kementerian Negara/Lembaga lain. Misalnya dalam penentuan perkiraan penerimaan bukan pajak.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan Negara, terdiri atas beberapa bagian, yaitu;

1. Produk Domestik Bruto, Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut.
2. Produk Nasional Bruto, Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain.
3. Produk Nasional Neto, Jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi).
4. Pendapatan Nasional Neto, Jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax).
5. Pendapatan Perseorangan, Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat.
6. Pendapatan Bebas, Pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, pendapatan bebas adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan.

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea keempat Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁹

Pengelola keuangan negara tidak boleh atau dilarang menetapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya. Ketika kebijakan ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan negara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keuangan negara. Pengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara. Pertanggung-jawaban itu boleh dilakukan kepada atasan yang lebih tinggi dan bahkan di hadapan pengadilan karena terancam dengan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Yang termasuk sebagai pengelola keuangan Negara, yaitu;

- a. Presiden
- b. Bendahara Umum Negara
- c. Menteri /Pimpinan Lembaga
- d. Bendahara
- e. Pegawai Negeri Bukan Bendahara
- f. Pejabat Lain

METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historycal approach*)

Penelitian ini akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka. terdiri dari, (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder serta (c) bahan hukum tertier. Kemudian dikaji dan dianalisis secara normatif berdasarkan kerangka analisis, teori, prinsip dan konsep-konsep yang telah dipilih dalam penelitian, lalu hasilnya akan disusun dalam suatu kesimpulan dan rekomendasi akhir.

⁹ Ibid, hlm. 35.

PEMBAHASAN

A. Penyusunan Anggaran Belanja Negara

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja negara. Belanja negara disusun menurut asas bruto di mana masing-masing Kementerian Negara/Lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran tapi juga perkiraan penerimaan yang mungkin didapat selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Anggaran Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Belanja ini terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain.

2. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

C. Penyusunan Anggaran Pengeluaran Negara

Penyusunan anggaran pengeluaran harus memiliki unsur-unsur; Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan; terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan; Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Pengeluaran negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut baik untuk kebutuhan harian atau rutin maupun untuk memenuhi pencapaian pembangunan.¹⁰

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran rutin digunakan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset negara, pemenuhan kewajiban kepada luar negeri, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

Terjadinya kenaikan pengeluaran rutin pemerintah yaitu pada belanja pegawai, subsidi serta pembayaran bunga utang luar negeri yang menyebabkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Dana yang dialokasikan kepada belanja pegawai berupa peningkatan gaji pegawai dan dana untuk pensiunan, sementara kondisi lonjakan harga minyak mentah dunia mengakibatkan pemerintah melakukan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berawal di tahun 1997/1998 semakin membengkakkan dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri serta merta mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pembayaran bunga utang. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah utang luar negeri yang jatuh tempo serta perubahan nilai tukar rupiah fluktuatif terhadap mata uang lain.

¹⁰ Hadi, Sutrisno. 1982. *Metodologi Reseach*, Jilid I. Yogyakarta : YP. Fakultas Psikologi, UGM, hlm. 339.

PENUTUP

Kesimpulan

Anggaran Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam penyusunan anggaran pendapatan Negara, terdiri atas beberapa bagian, yaitu; Produk Domestik Bruto; Produk Nasional Bruto; Produk Nasional Neto; Pendapatan Nasional Neto; Pendapatan Perseorangan; Pendapatan Bebas dan Pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Pengeluaran negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut baik untuk kebutuhan harian atau rutin maupun untuk memenuhi pencapaian pembangunan.

Saran

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara oleh pemerintah pusat yang diakui sebaiknya dalam pengurangan nilai kekayaan bersih dibagi sesuai porsi daerah masing-masing. Penyusunan anggaran pendapatan Negara, harus melihat berbagai unsur untuk menunjang pendapatan secara maksimal. Pengeluaran negara harus diperuntuk sesuai yang telah ditetapkan bersama baik oleh pemerintah maupun DPR. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (dari 1 Januari sampai 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat atau daerah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperkirakan kondisi keuangan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deddi & Ayuningtyas. Akuntansi Sektor Publik. 2010. Salemba Empat; Jakarta
- Baswir Revrison. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. 1998. BPFE Yogyakarta
- Nordiawan Deddi. Akuntansi Sektor Publik. 2006. Salemba Empat; Jakarta
- Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Modul Pengelolaan Keuangan Negara, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta 2014.
- Dedi Nordiawan, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktek), Edisi Ketiga, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajawali Press.
- Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Justice Publisher, Lampung, 2014.
- Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hadi, Sutrisno. 1982. Metodologi Reseach, Jilid I. Yogyakarta: YP. Fakultas Psikologi, UGM.
- Suparmoko dan Irawan. 2003. Ekonomika Pembangunan. Edisi keenam. Yogyakarta. BPFE. UGM.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara